

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.506 pulau, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km , dan luas laut sekitar 3,1 juta km persegi. Indonesia juga mempunyai banyak desa yang menyentuh angka 67.493 desa (Kusnadi, 2006). Selain itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009, Indonesia memiliki hak pengelolaan sumber daya pengelolaan sumber daya alam hayati dan nonhayati di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yaitu perairan yang berada 12 hingga 200 mil dari garis pantai titik-titik terluar kepulauan Indonesia, yang luasnya 2.7 juta km² berdasarkan *United Convention on the Law of the Seas*

Kawasan masyarakat pesisir adalah suatu daerah di sepanjang daerah pantai utara (pesisiran). Garis pantai yang panjang menyimpan potensi kekayaan sumber daya alam yang besar. Potensi itu merupakan sumber daya hayati dan non hayati. Potensi hayati dapat berupa: perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang, sedangkan potensi non hayati dapat berbentuk: mineral dan bahan tambang serta pariwisata.

Sebagai daerah peralihan antara daratan dan lautan, kawasan pesisir merupakan kawasan yang unik ditinjau dari karakteristiknya ekososio-

sistemnya, yaitu: (a) kawasan pesisir merupakan *multiple-use zona* yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, dan memiliki *open access* untuk semua yang berkepentingan, (b) beberapa habitat di kawasan pesisir mempunyai atribut ekologis” (spesies endemic, spesies langka dll) dan ”proses-proses ekologis” (daerah pemijahan, daerah asuhan, alur migrasi biodata dll) yang menentukan daya dukung kawasan pesisir dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan, dan (c) seluruh limbah dan sediment yang berasal dari daratan (kawasan hulu) akan mengalir dan terakumulasi di kawasan pesisir. Jika ditinjau dari fungsinya, ekosistem pesisir memiliki empat fungsi utama bagi kehidupan manusia, yaitu: 1) sebagai penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan. 2) sebagai penyedia jasa-jasa kenyamanan, 3) sebagai penyedia sumber daya alam, 4) sebagai penerima atau penyerap limbah. (Budi dan Wahyu Setiawan, 2004)

Dengan potensi yang demikian besar masyarakat pesisir terutama nelayan kecil malah memiliki masalah kemiskinan, Data dari Badan Pusat Statistik (2010) tercatat 10.639 desa pesisir dengan jumlah 1.132.152 RT, 1.870.468 jiwa. Jumlah penduduk yang miskin sebanyak 390.216 RT, 2.181.028 jiwa. Ini memberikan indikasi bahwa masyarakat pesisir perlu mendapat perhatian yang lebih besar.

Sebagaimana kawasan pesisir pada umumnya, pembangunan di kawasan Pesisir Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi beberapa masalah di antaranya: sebagian besar merupakan daerah terisolir; sarana pelayanan dasar termasuk prasarana fisik masih terbatas; kondisi lingkungan kurang terpelihara sehingga kurang memenuhi persyaratan kesehatan; air bersih dan sanitasi jauh dari mencukupi, keadaan perumahan umumnya masih jauh dari layak huni dan pendapatan penduduk masih sangat rendah (Dahuri,2004:299).

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki wilayah pesisir cukup luas, total desa pesisirnya yaitu ada 13 dari 6 kecamatan di kabupaten Sidoarjo. Selain sebagai penopang kota Surabaya dikarenakan kedua daerah tersebut saling mendukung dan saling menopang termasuk rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Kabupaten ini melakukan pembangunan di bidang kemaritiman diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat pesisir dalam berbagai bidang untuk menuju swasembada dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Dalam perencanaan pembangunan desa termasuk desa yang berada di pesisir pantai atau desa maritim, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan sosialisasi kepada semua komponen. Komponen masyarakat ini meliputi masyarakat secara individu, kelompok serta organisasi yang ada di masing-masing desa seperti Karang Taruna, Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Organisasi Keagamaan (Pengurus Masjid/Majelis

Ta'lim) agar selalu diikuti sertakan dalam setiap proses pembangunan desa. (Tim, 2011, Penyusunan Minapolitan Kabupaten Sidoarjo)

Dari total penduduk Sidoarjo sejumlah 2,12 juta jiwa (2015), sebanyak 6,43% nya merupakan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan(miskin/sangat miskin). Dari perbandingan tingkat kemiskinan antar kecamatan, terdapat pola yang menunjukkan bahwa kecamatan pinggiran cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibanding kecamatan lainnya. Dari hasil pendataan PPLS terakhir, tiga kecamatan dgn tingkat kemiskinan tertinggi yaitu : Kec. Jabon (26,17%), Krembung (24,82%) dan Balongbendo (20,79%).

Sementara itu, kecamatan yang secara geografis (akses) lebih dekat dengan Surabaya, tingkat kemiskinannya cenderung lebih rendah, yaitu : Kecamatan Waru, Taman, Gedangan, Sukodono, Sedati, Buduran dan Kecamatan Sidoarjo. (Badan Pusat Statistik Wilayah Sidoarjo)

Tingkat Kemiskinan di Sidoarjo

Uraian	2011	2013	2015
Jumlah Rumahtangga	530,5	544,1	563,1
Garis Kemiskinan (Rp/kpt/bln)	277.776	329.946	372.623
Jml. Penduduk Miskin (000)	136,3	138,2	136,1
% Penduduk Miskin	6,97	6,72	6,43
Jml. Penduduk Miskin Jatim (000)	5.227	4.893	4.789
% Pddk Miskin Jatim	13,85	12,73	12,34

Sumber Data: BPS

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan di Sidoarjo

Di tahun 2014 Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa rumah tangga di Indonesia khususnya masyarakat nelayan mengandalkan hidupnya dari menangkap ikan sebanyak 964.231 jiwa atau sekitar 1,5 persen dari rumah tangga di Indonesia, kebanyakan berada di propinsi Jawa Timur. Dari jumlah itu rumah tangga nelayan laut yang tergolong miskin ada 23,79%, nelayan di perairan umum 24,98%, sedangkan budidaya 23,44%. Pendapatan per kapita nelayan sendiri di perairan umum adalah Rp 642.350, sedangkan nelayan laut Rp 737.030.

Oleh sebab itu keadaan seperti ini akan mengakibatkan keadaan mereka tetap akan terpuruk. Sebagi mana yang dikatakan oleh Yusuf Solichien Martadiningrat ketua Umum DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Medan, Sumatera Utara, belum lama ini, data yang ia miliki menyatakan bahwa sedikitnya 14,58 juta atau sekitar 92% dari 16,2 juta nelayan di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. (<http://www.menkokesra.go.id/content/view/9794/39>)

Masalah yang ada sekarang ini adalah dimana proses komunikasi pembangunan yang tidak berjalan begitu baik, nelayan masih mendapat masalah seperti keterbatasan akses pada permodalan, pasar, tangkapan yang bervariasi, dan program penyuluhan yang tidak berjalan sesuai harapan, tidak tersedianya strategi komunikasi pembangunan yang jitu membuat masyarakat pesisir juga akan terus membuat nasibnya tidak akan berubah. Ada beberapa program dari pemerintah dalam konteks komunikasi pembangunan tapi belum semua program memberikan perubahan positif terhadap peningkatan kualitas hidup di kalangan masyarakat

pesisir dan perhatian masyarakat terhadap penyediaan prasarana juga tidak selalu muncul dengan sendirinya.

Proposal ini diharapkan berfokus pada kondisi masyarakat pesisir dan peran komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di kabupaten Sidoarjo. Penyebab masalah, solusi permasalahan yang dihadapi nelayan, cara penyelesaian masalah, diperlukan untuk mendesain rancangan strategi komunikasi pembangunan yang relevan.

Kegiatan sektor perikanan dan kelautan, memiliki dua bidang usaha (Amanah dan Yulianto 2002) yaitu perikanan darat dan perikanan tangkap. Hasil penelitian tentang pendekatan penyuluhan pada masyarakat pesisir (Amanah et al. 2004) memperlihatkan bahwa setiap komunitas memiliki keunikan dan berbeda dalam hal nilai, orientasi, dan kebutuhan pengembangan diri, kelompok, komunitas, serta daya dukung lingkungan fisik. Dalam hal ini komunikasi pembangunan dapat menjadi wahana transformasi situasi masyarakat dari sekarang ke kondisi yang lebih baik.

Komunikasi pembangunan dalam arti sempit adalah segala upaya, cara dan teknik penyampaian gagasan dan ketrampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan kepada masyarakat yang menjadi sasaran, agar dapat memahami, menerima dan berpartisipasi dalam pembangunan, Dilla (2007:116). Oleh karena itu peranan komunikasi dalam pembangunan harus dikaitkan dengan arah perubahan tersebut, artinya kegiatan komunikasi harus

mampu mengantisipasi gerak pembangunan khususnya dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas yang melandasi penelitian ini, maka perumusan masalahnya adalah bagaimana Peran Komunikasi Pembangunan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Sidoarjo ?

1.3. Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Komunikasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Sidoarjo

1.4. Manfaat penelitian

1. Kegunaan teoritis : Menambah kajian ilmu komunikasi yang berkaitan dengan penelitian peran komunikasi dalam pemberdayaan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi landasan pemikiran untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan praktis : penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat pesisir yang bisa memaksimalkan kehidupan pesisir agar kehidupan mereka jadi lebih baik dari yang sebelumnya.